

PROFILE

2023

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyusun Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Katingan. Penyusunan Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Katingan Nomor Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Katingan. Profil BKAD Kabupaten Katingan ini disusun sebagai data pendukung dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam penyusunan Profil BKAD Kabupaten Katingan tidak lepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, petunjuk, dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami mengucapkan banyak terima kasih.

Kami menyadari bahwa penyusunan Profil BKAD Kabupaten Katingan Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan. Semoga Profil BKAD Kabupaten Katingan Tahun 2022 dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasongan, Februari 2023

DAFTAR ISI

Cover Profil	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	1
C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	4
D. Tugas dan Fungsi	5
E. Struktur Organisasi	8
F. Sumber Daya	10
G. Isu-Isu Strategis	15
H. Indikator Kinerja Utama SOPD	16
I. Target dan Realisasi Keuangan 2022	17
J. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	23
K. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja	26
L. Target Capaian Kinerja Tahun 2023	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	10
Tabel 2	Kekuatan Personil yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berdasarkan Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional / Pegawai Harian Lepas)	11
Tabel 3	Kekuatan Personil yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berdasarkan Golongan Ruang / Pegawai Harian Lepas)	12
Tabel 4	Kekuatan Personil yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 5	Kekuatan Personil yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berdasarkan Jenis Kelamin)	13
Tabel 6	Anggaran dan Realisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	13
Tabel 7	Sarana dan Prasarana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	14
Tabel 8	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	16
Tabel 9	Realisasi Anggaran Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	17
Tabel 10	Realisasi Anggaran Sekretariat dan Bidang - Bidang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022	19
Tabel 11	Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022	24
Tabel 12	Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Sasaran I : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BPKAD)	25
Tabel 13	Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Sasaran II : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah)	25

Tabel 14 Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah)	26
Tabel 15 Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Sasaran IV : Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah)	26
Tabel 16 Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023	27
Tabel 17 Target Capaian Kinerja Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	8
Gambar 2	Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kondisi Saat Ini	9
Gambar 3	Anggaran dan Realisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	14
Gambar 4	Daya Serap Anggaran Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022	22
Gambar 5	Persentase (%) Realisasi Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022	23

A. GAMBARAN UMUM

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena merupakan amanah yang diemban untuk terselenggaranya *good governance*. Dalam kerangka prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bernegara dan berbangsa diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Katingan untuk memberikan ***PELAYANAN YANG BAIK AGAR TERWUJUD KATINGAN "BERMARTABAT" UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA "BERMARTABAT" (BERBUDAYA, MAJU, RELIGIUS, TERINTEGRASI, BERKESINAMBUNGAN AMAN DAN TERBUKA)*** maka pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dituntut dapat dikelola dengan optimal, tertata, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta adanya perhatian pada prioritas sisi belanja dan pembiayaan yang mencerminkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat luas sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan disusun berlandaskan pada :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional : Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Landasan Operasional Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 Kabupaten Katingan;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 79);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1);.
- 27) Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 692);

C. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi

KATINGAN "BERMARTABAT" UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA "BERMARTABAT" (BERBUDAYA, MAJU, RELIGIUS, TERINTEGRASI, BERKESINAMBUNGAN AMAN DAN TERBUKA)

2. Misi

- a) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supermasi hukum
- b) Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing,
- c) Memantapkan pembangunan perdesaan

- d) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender
- e) Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi
- f) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan
- g) Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya

3. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan penyusunan kebijakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, yaitu *Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transfaran Dan Akuntabel.*

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan difokuskan pada upaya tercapainya perwujudan profesionalisme aparatur yang mendukung perwujudan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan serta peningkatan mutu pelayanan, yaitu :

- a) *Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BKAD*
- b) *Meningkatnya akunbilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah*
- c) *Meningkatnya akunbilitas kinerja pengelolaan aset daerah*
- d) *Peningakatan Efektifitas Penganggaran Daerah*

D. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan mempunyai rincian tugas di bidang administrasi keuangan daerah, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Peubahannya.
- b. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peningkatan Kapasitas Sumbe Daya Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
- c. Dana Transfer, Investasi dan Pinjaman Daerah
 - Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 1) Pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU Kabupaten
 - 2) Pengelolaan DAU Kabupaten/Kota
 - 3) Pelaporan pengelolaan DAU Kabupaten
 - Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - 1) Pengelolaan DAK (bagi Kabupaten yang menerima DAK)
 - 2) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK
 - Dana Bagi Hasil (DBH)
 - 1) Penyiapan data realisasi penerima DBH Kabupaten
 - 2) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH
 - Penetapan, pelaksanaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan investasi dan aset daerah
 - Penetapan, pelaksanaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLUD Kabupaten
- d. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - Penetapan kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Desa
 - Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten dan APB Desa
 - Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

- Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (Urusan Konkuren)
- Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan dan pelaksanaan APB Desa

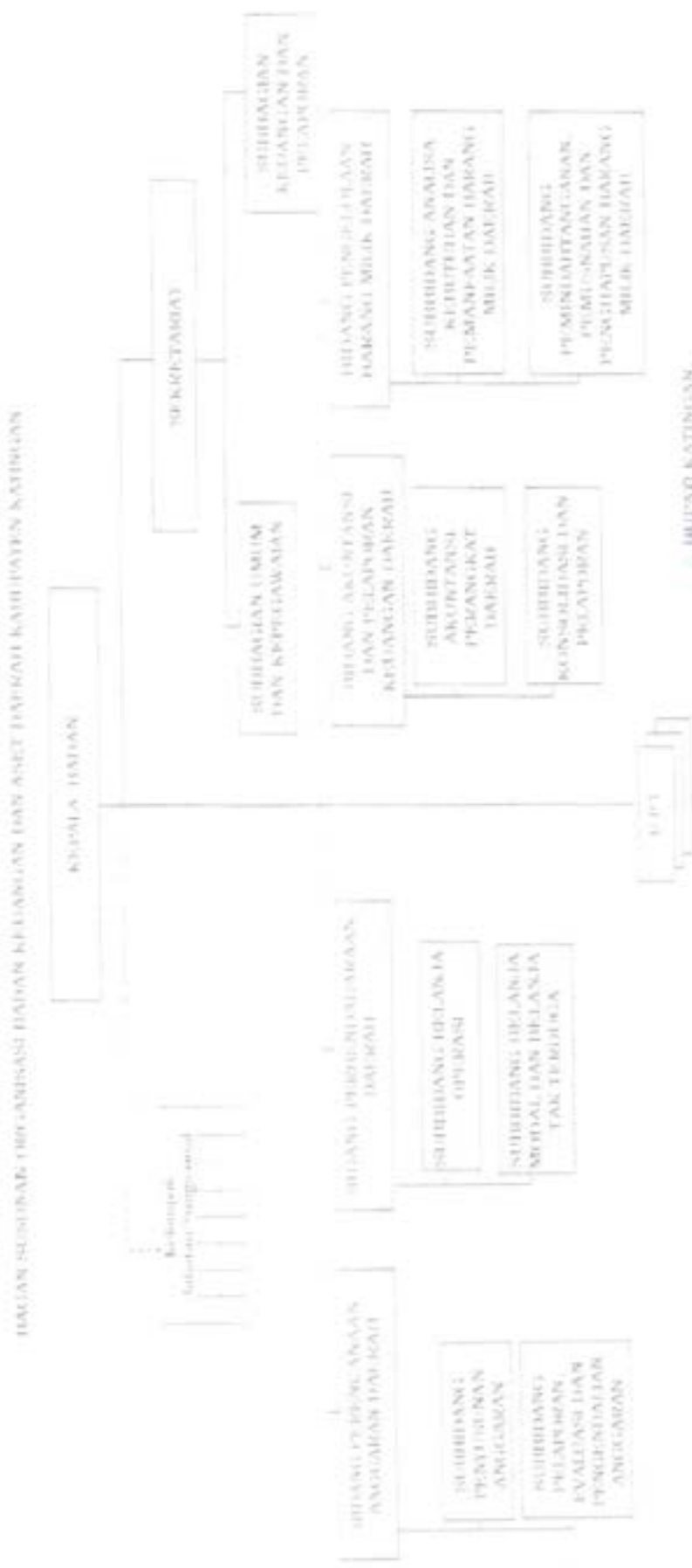
2. Fungsi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan keuangan dan Aset Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

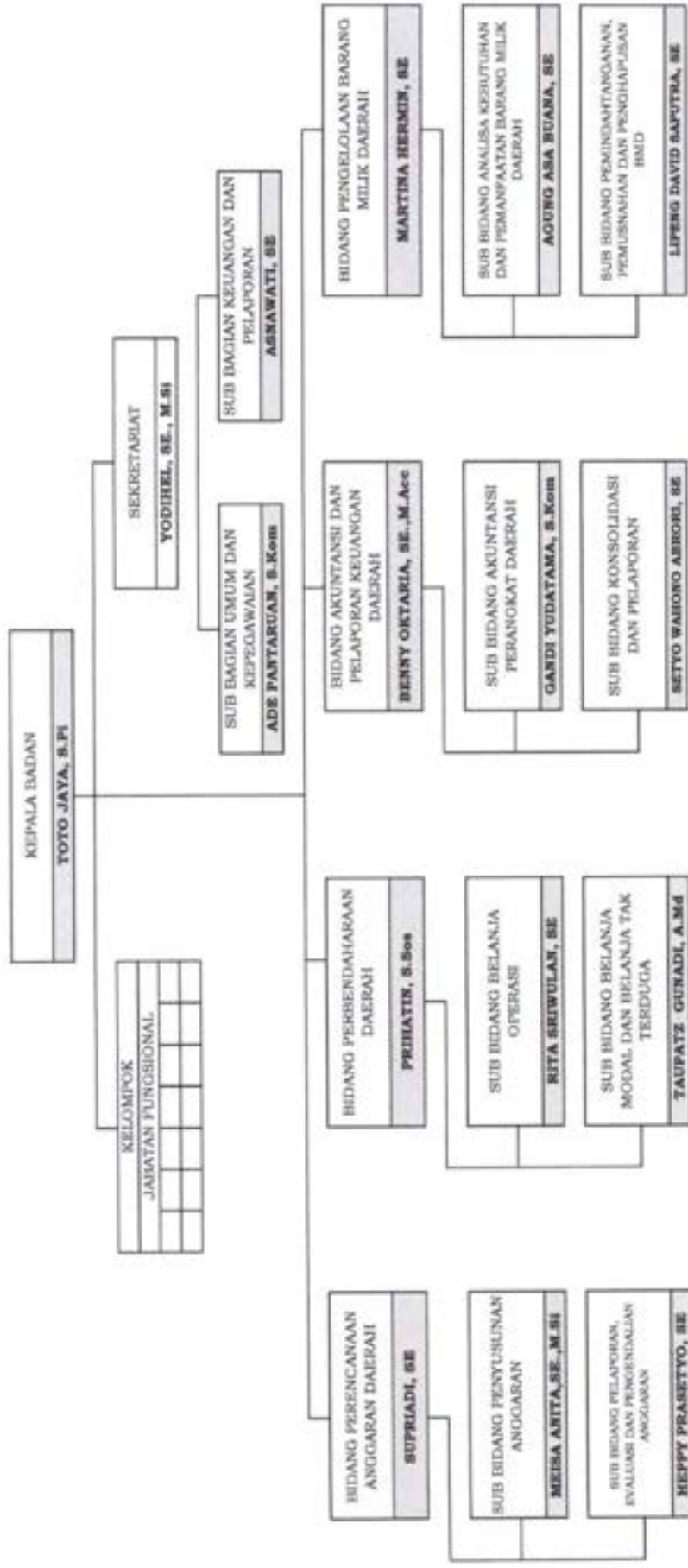
E. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan



Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kondisi Saat Ini

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN



F. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan saat ini berjumlah 66 (enam puluh enam) orang, terdiri dari Pejabat eselon IIa berjumlah 1 orang Kepala Badan, pejabat eselon IIIa berjumlah 1 orang Sekretaris Badan, Pejabat Eselon IIIb jumlah 4 (empat) orang, terdiri dari Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sedangkan pejabat eselon 4 berjumlah 14 (empat belas) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 8 (delapan) orang Kepala Sub Bidang, serta 4 (lima) orang Pejabat Fungsional Tertentu. Adapun Staf Pelaksana terdiri dari

Untuk mengetahui lebih jelasnya berkaitan dengan kuantitas sumber daya manusia aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

No	Nama Jabatan	Esselon	Jumlah	Ket
1	Kepala Badan	Esselon II.a	1	
2	Sekretaris	Esselon III.a	1	
3	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Esselon III.b	1	
4	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Esselon III.b	1	
5	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Esselon III.b	1	
6	Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	Esselon III.b	1	
7	Kasubbag. Umum & Kepegawaian	Esselon IV.a	1	
8	Kasubid. Belanja Operasi	Esselon IV.a	1	
9	Kasubid. Analisa Kebutuhan & Pemanfaatan BMD	Esselon IV.a	1	
10	Kasubid. Belanja Modal & Belanja Tak Terduga	Esselon IV.a	1	
11	Kasubid. Akuntansi Perangkat Daerah	Esselon IV.a	1	
12	Kasubid. Penyusunan Anggaran	Esselon IV.a	1	
13	Kasubag. Keuangan dan Pelaporan	Esselon IV.a	1	
14	Kasubid. Konsolidasi dan Pelaporan	Esselon IV.a	1	

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah	Ket
15	Kasubid. Pelaporan, Evaluasi & Pengendalian Anggaran	Eselon IV.a	1	
16	Kasubid. Pemindahtanganan, Pemusnahan & Penghapusan BMD	Eselon IV.a	1	
17	Pejabat Fungsional Tertentu Analis Keuangan Pusat dan Daerah		3	
18	Pejabat Fungsional Tertentu Perencana		1	
19	PPKD	Non Eselon	1	
20	Bendahara Pengeluaran OPD	Non Eselon	1	
21	Pengurus Barang	Non Eselon	1	
22	Pelaksana	Non Eselon	11	
		Non PNS	32	
	TOTAL (PNS + NON PNS)		66	

Adapun perincian Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dapat diketahui sebagaimana dituangkan dalam tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Kekuatan Personil yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berdasarkan Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional / Pegawai Harian Lepas)

Penempatan	Eselon			JFT	JFU	PHL	Jumlah
	II	III	IV				
Kepala	1						1
Sekretariat		1	2	1	4	12	20
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah		1	2	1		5	9
Bidang Perbendaharaan Daerah		1	2	1	5	7	16
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1	2		1	3	7
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah		1	2	1	4	5	13
Jumlah	1	5	10	4	14	32	66

Tabel 3. Kekuatan Personil yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berdasarkan Golongan Ruang / Pegawai Harian Lepas)

Penempatan	Golongan Ruang			PHL	Jumlah
	IV	III	II		
Kepala	1				1
Sekretariat	1	5	2	12	20
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah		4		5	9
Bidang Perbendaharaan Daerah	1	6	2	7	16
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1	3		3	7
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah		5	3	5	13
Jumlah	4	23	7	32	66

Tabel 4. Kekuatan Personil yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Jabatan	Jumlah					Jumlah
		S2	S1	D3	D2	SLTA	
PNS							
1	Kepala Badan		1				1
2	Sekretaris	1					1
3	Kepala Bidang	1	3				4
4	Kepala Subbag/Subbid	1	9				10
5	Pejabat Fungsional Tertentu	1	3				4
6	Staf Pelaksana		3	4		7	14
NON PNS							
1	Staf Pelaksana		21		1	10	32
TOTAL		4	40	4	1	17	66

Tabel 5. Kekuatan Personil yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan (Berdasarkan Jenis Kelamin)

Eselon / jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	1		1
Eselon III	3	2	5
Eselon IV	7	3	10
Jabatan Fungsional Tertentu	2	2	4
Jabatan Fungsional Umum / Staf	7	7	14
PHL	18	14	32
Jumlah	38	28	66

2. Keuangan

Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sepenuhnya berasal dari APBD Kabupaten Katingan. Pada tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan mengelola anggaran sebagai berikut :

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Uraian	2022			2023
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)	Anggaran (Rp.)
Belanja Operasi	35.887.570.007	27.093.051.278	75,49	30.382.771.733
Belanja Modal	14.784.678.791	14.552.130.967	98,43	7.738.511.814
Belanja Tidak Terduga	8.700.000.000	8.214.800.079	94,42	10.000.000.000
Belanja Transfer	205.671.827.100	205.496.253.078	99,91	216.596.446.924
Total Belanja	265.044.075.898	255.356.235.402	96,34	264.717.730.471

Grafik anggaran belanja terhadap realisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun ditunjukkan sebagai berikut :

Gambar 3. Anggaran dan Realisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan



3. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Kondisi sarana dan prasarana di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan memiliki 4 (empat) bangunan gedung, 2 (dua) bangunan parkir, 24 (dua puluh empat) Kendaraan Roda 2 serta 7 (tujuh). Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Sarana dan Prasarana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

Uraian		Jumlah
Bangunan Gedung	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	1 Unit
	Gedung Arsip	1 Unit
	Bangunan Tempat Genset	1 Unit
	Gedung Aula BKAD	1 Unit

Uraian		Jumlah
	Musholla	1 Unit
Bangunan	Bangunan Parkir Kendaraan Roda 4	1 Unit
Parkir	Bangunan Parkir Kendaraan Roda 2	1 Unit
Kendaraan	Kendaraan Roda 2	24 Unit
	Kendaraan Roda 4	7 Unit
Jumlah		38 Unit

G. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam ruang lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan, antara lain :

1. Kualitas SDM aparatur masih belum memadai;
2. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan penyusunan penganggaran;

H. INDIKATOR KINERJA UTAMA SOPD

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan merupakan tolak ukur dan acuan dalam pencapaian kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan sesuai dengan Renstra 2018 - 2013.

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	PENJELASAN	RUMUSAN PERHITUNGAN INDIKATOR	SUMBER DATA (BIDANG/ SUB. BIDANG)	TARGET				
						2019	2020	2021	2022	2023
1 Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	2 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BPKAD	3 Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD Persentase laporan keuangan yang memenuhi standar dan terverifikasi	4 Nilai RB yang diperoleh Nilai SAKIP yang diperoleh Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	5 Predikat Nilai RB Predikat Nilai SAKIP	6 Bidang Sekretariat Bidang Sekretariat	7 C	8 CC	9 B	10 BB	11 BB
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu dibagi jumlah keseluruhan Laporan Keuangan x 100%	Persentase laporan penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Tepat Waktu dibagi jumlah keseluruhan Laporan Keuangan x 100%	100	Bidang Akuntansi/ Bidang Perbendaharaan	100	100	100	100
Peningkatan Efektivitas Penganggaran daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu dibagi jumlah laporan pengelolaan aset daerah x 100%	Bidang Pengelolaan Barang Daerah	100	100	100	100	100
	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran	Jumlah OPD yang Menyusun Dokumen Anggaran Tepat Waktu	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	100	100	100	100	100

I. TARGET DAN REALISASI KEUANGAN 2022

Kelancaran tugas Pemerintahan Daerah dalam rangka menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan ditunjang sektor keuangan / anggaran yang memadai. Di bawah ini disajikan rincian realisasi anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan yang dicapai Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 9. Realisasi Anggaran Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI		FISIK
			KEUANGAN (Rp)	%	(%)
1	2	4	5	6	7
1	KEUANGAN	265.044.075.898,00	255.356.235.402,00	96,34	96,34
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.483.912.319,00	26.067.323.031,00	88,41	88,41
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	277.313.364,00	237.577.800,00	85,67	85,67
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.382.166,00	81.905.400,00	90,62	90,62
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	78.051.684,00	73.539.100,00	94,22	94,22
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.879.514,00	82.133.300,00	75,44	75,44
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.655.112.946,00	7.262.166.536,00	83,91	83,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.431.379.152,00	7.085.039.836,00	84,03	84,03
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	67.528.400,00	60.420.700,00	89,47	89,47
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	156.205.394,00	116.706.000,00	74,71	74,71
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	539.227.909,00	464.001.950,00	86,05	86,05
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	366.852.967,00	339.851.950,00	92,64	92,64
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	172.374.942,00	124.150.000,00	72,02	72,02
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.795.600.263,00	2.795.974.949,00	73,66	73,66
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	101.875.076,00	101.640.000,00	99,77	99,77
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.303.551.735,00	1.142.303.720,00	87,63	87,63
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	142.277.135,00	125.168.050,00	87,97	87,97
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	582.021.796,00	257.288.329,00	44,21	44,21
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	307.964.621,00	295.906.000,00	96,08	96,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87.844.900,00	81.992.000,00	93,34	93,34
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.270.065.000,00	791.676.850,00	62,33	62,33
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.683.547.180,00	13.480.846.397,00	98,52	98,52
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.433.122.300,00	13.255.246.397,00	98,68	98,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.424.880,00	225.600.000,00	90,09	90,09
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.229.077.950,00	941.321.909,00	76,59	76,59
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.550.000,00	343.750,00	0,77	0,77
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	355.110.800,00	239.081.159,00	67,33	67,33

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI		FISIK
			KEUANGAN (Rp)	%	(%)
1	2	4	5	6	7
	dan Listrik				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.856.500,00	61.714.000,00	60,59	60,59
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	727.560.650,00	640.183.000,00	87,99	87,99
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.304.032.707,00	885.433.490,00	67,90	67,90
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	910.244.677,00	501.922.090,00	55,14	55,14
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	393.788.030,00	383.511.400,00	97,39	97,39
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	233.848.911.341,00	227.836.846.884,00	97,43	97,43
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.599.255.126,00	1.422.144.020,00	88,93	88,93
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	124.329.744,00	105.684.300,00	85,00	85,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	69.092.700,00	58.705.400,00	84,97	84,97
	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	287.122.232,00	268.245.850,00	93,43	93,43
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	311.941.289,00	259.260.000,00	83,11	83,11
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	806.769.161,00	730.248.470,00	90,52	90,52
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.441.588.642,00	1.224.540.545,00	84,94	84,94
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	544.960.700,00	439.134.338,00	80,58	80,58
	Sub Kegiatan Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	146.603.875,00	128.377.902,00	87,57	87,57
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	340.735.899,00	319.128.800,00	93,66	93,66
	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	37.794.499,00	28.314.993,00	74,92	74,92
	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	371.493.669,00	309.584.512,00	83,34	83,34
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.005.811.781,00	820.237.975,00	81,55	81,55
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	147.611.122,00	115.880.500,00	78,50	78,50
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	402.230.412,00	329.998.050,00	82,04	82,04
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	196.138.832,00	195.153.725,00	99,50	99,50
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	15.900.219,00	2.365.000,00	14,87	14,87
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	120.182.296,00	108.219.700,00	90,05	90,05
	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	123.748.900,00	68.621.000,00	55,45	55,45
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	229.475.152.652,00	224.045.231.419,00	97,63	97,63

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI		FISIK
			KEUANGAN (Rp)	%	(%)
1	2	4	5	6	7
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	15.103.325.552,00	10.334.178.262,00	68,42	68,42
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	203.171.827.100,00	203.076.327.099,00	99,95	99,95
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.700.000.000,00	8.214.800.079,00	94,42	94,42
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.500.000.000,00	2.419.925.979,00	96,80	96,80
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	327.103.140,00	324.692.925,00	99,26	99,26
	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	235.303.140,00	234.459.250,00	99,64	99,64
	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	91.800.000,00	90.233.675,00	98,29	98,29
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.711.252.238,00	1.452.065.487,00	84,85	84,85
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.711.252.238,00	1.452.065.487,00	84,85	84,85
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	104.190.782,00	69.540.000,00	66,74	66,74
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	532.711.000,00	475.046.295,00	89,18	89,18
	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	179.014.000,00	166.554.792,00	93,04	93,04
	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	757.300.456,00	615.129.400,00	81,23	81,23
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	138.036.000,00	125.795.000,00	91,13	91,13
II	PEMBIAYAAN DAERAH	14.879.000.000,00	14.878.000.000,00	99,99	99,99
	- Pengeluaran Pembiayaan	14.879.000.000,00	14.878.000.000,00	99,99	99,99
	SUBTOTAL BELANJA DAERAH	265.044.075.898,00	255.356.235.402,00	96,34	96,34
	- SUBTOTAL BELANJA OPERASI	35.887.570.007,00	27.093.051.278,00	75,49	75,49
	- SUBTOTAL BELANJA MODAL	14.784.678.791,00	14.552.130.967,00	98,43	98,43
	- SUBTOTAL BELANJA TIDAK TERDUGA	8.700.000.000,00	8.214.800.079,00	94,42	94,42
	- SUBTOTAL BELANJA TRANSFER	205.671.827.100,00	205.496.253.078,00	99,91	99,91
	TOTAL BELANJA DAN PEMBIAYAAN	279.923.075.898,00	270.234.235.402,00	96,54	96,54

Adapun realisasi anggaran Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ditunjukkan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 10. Realisasi Anggaran Sekretariat dan Bidang-Bidang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI		FISIK
			KEUANGAN (Rp)	%	(%)
1	2	4	5	6	7
	SEKRETARIAT	29.483.912.319,00	26.067.323.031,00	88,41	88,41
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	277.313.364,00	237.577.800,00	85,67	85,67
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.382.166,00	81.905.400,00	90,62	90,62
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	78.051.684,00	73.539.100,00	94,22	94,22

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI		FISIK (%)
			KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	4	5	6	7
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.879.514,00	82.133.300,00	75,44	75,44
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.655.112.946,00	7.262.166.536,00	83,91	83,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.431.379.152,00	7.085.039.836,00	84,03	84,03
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	67.528.400,00	60.420.700,00	89,47	89,47
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	156.205.394,00	116.706.000,00	74,71	74,71
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	539.227.909,00	464.001.950,00	86,05	86,05
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	366.852.967,00	339.851.950,00	92,64	92,64
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	172.374.942,00	124.150.000,00	72,02	72,02
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.795.600.263,00	2.795.974.949,00	73,66	73,66
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	101.875.076,00	101.640.000,00	99,77	99,77
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.303.551.735,00	1.142.303.720,00	87,63	87,63
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	142.277.135,00	125.168.050,00	87,97	87,97
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	582.021.796,00	257.288.329,00	44,21	44,21
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	307.964.621,00	295.906.000,00	96,08	96,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	87.844.900,00	81.992.000,00	93,34	93,34
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.270.065.000,00	791.676.850,00	62,33	62,33
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.683.547.180,00	13.480.846.397,00	98,52	98,52
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.433.122.300,00	13.255.246.397,00	98,68	98,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.424.880,00	225.600.000,00	90,09	90,09
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.229.077.950,00	941.321.909,00	76,59	76,59
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.550.000,00	343.750,00	0,77	0,77
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	355.110.800,00	239.081.159,00	67,33	67,33
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	101.856.500,00	61.714.000,00	60,59	60,59
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	727.560.650,00	640.183.000,00	87,99	87,99
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.304.032.707,00	885.433.490,00	67,90	67,90
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	910.244.677,00	501.922.090,00	55,14	55,14
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	393.788.030,00	383.511.400,00	97,39	97,39
	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	1.599.255.126,00	1.422.144.020,00	88,93	88,93
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.599.255.126,00	1.422.144.020,00	88,93	88,93
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	124.329.744,00	105.684.300,00	85,00	85,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	69.092.700,00	58.705.400,00	84,97	84,97
	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	287.122.232,00	268.245.850,00	93,43	93,43
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	311.941.289,00	259.260.000,00	83,11	83,11

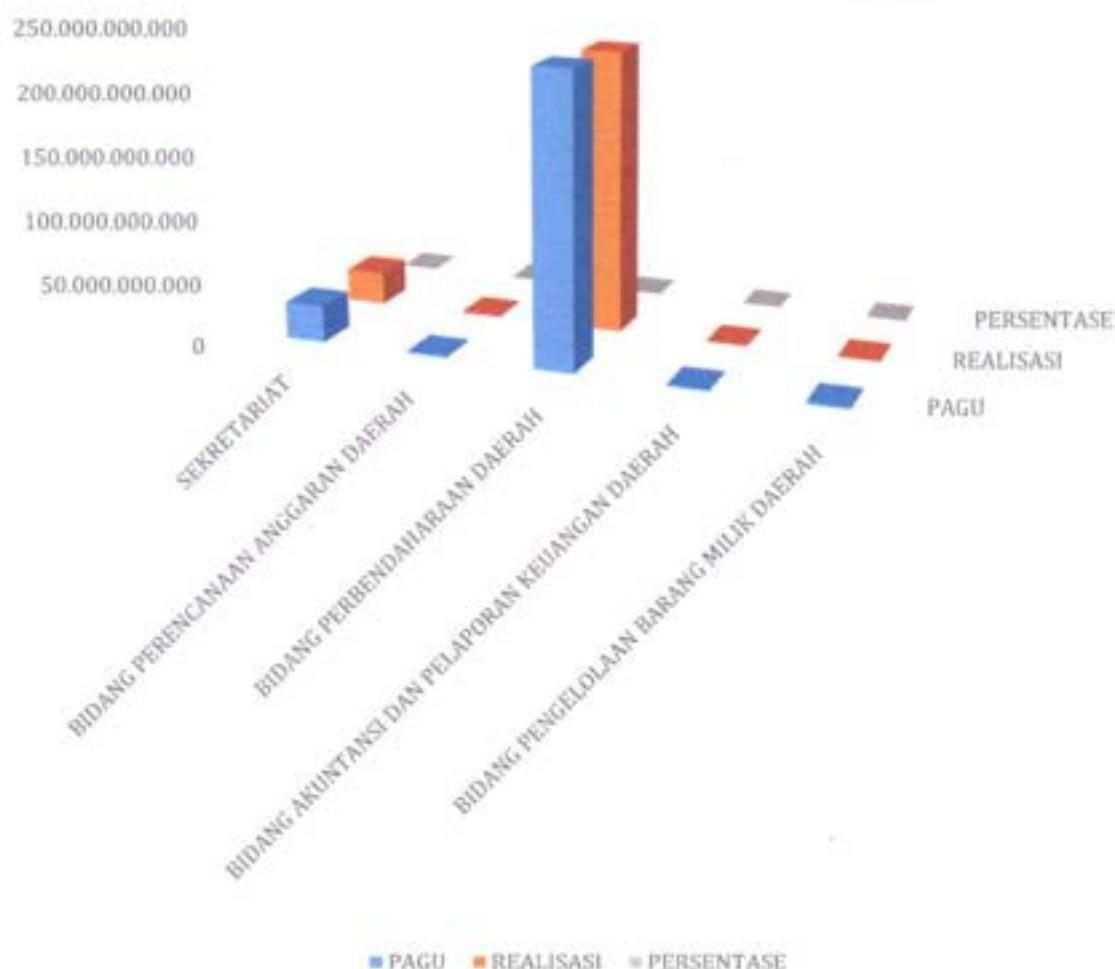
No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI		FISIK
			KEUANGAN (Rp)	%	(%)
1	2	4	5	6	7
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	806.769.161,00	730.248.470,00	90,52	90,52
	BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH	230.916.741.294,00	225.269.771.964,00	97,55	97,55
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.441.588.642,00	1.224.540.545,00	84,94	84,94
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	544.960.700,00	439.134.338,00	80,58	80,58
	Sub Kegiatan Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	146.603.875,00	128.377.902,00	87,57	87,57
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	340.735.899,00	319.128.800,00	93,66	93,66
	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	37.794.499,00	28.314.993,00	74,92	74,92
	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	371.493.669,00	309.584.512,00	83,34	83,34
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	229.475.152.652,00	224.045.231.419,00	97,63	97,63
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	15.103.325.552,00	10.334.178.262,00	68,42	68,42
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	203.171.827.100,00	203.076.327.099,00	99,95	99,95
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8.700.000.000,00	8.214.800.079,00	94,42	94,42
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.500.000.000,00	2.419.925.979,00	96,80	96,80
	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.332.914.921,00	1.144.930.900,00	85,90	85,90
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.005.811.781,00	820.237.975,00	81,55	81,55
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	147.611.122,00	115.880.500,00	78,50	78,50
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	402.230.412,00	329.998.050,00	82,04	82,04
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	196.138.832,00	195.153.725,00	99,50	99,50
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	15.900.219,00	2.365.000,00	14,87	14,87
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	120.182.296,00	108.219.700,00	90,05	90,05
	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	123.748.900,00	68.621.000,00	55,45	55,45
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	327.103.140,00	324.692.925,00	99,26	99,26
	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	235.303.140,00	234.459.250,00	99,64	99,64
	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	91.800.000,00	90.233.675,00	98,29	98,29
	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.711.252.238,00	1.452.065.487,00	84,85	84,85
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.711.252.238,00	1.452.065.487,00	84,85	84,85
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	104.190.782,00	69.540.000,00	66,74	66,74
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	532.711.000,00	475.046.295,00	89,18	89,18
	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	179.014.000,00	166.554.792,00	93,04	93,04

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI		FISIK
			KEUANGAN (Rp)	%	(%)
1	2	4	5	6	7
	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	757.300.456,00	615.129.400,00	81,23	81,23
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	138.036.000,00	125.795.000,00	91,13	91,13

Daya serap anggaran belanja Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ditunjukkan di bawah ini :

Gambar 4. Daya Serap Anggaran Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022

Daya Serap Anggaran Belanja Tahun 2022



Adapun persentase (%) realisasi belanja Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ditunjukkan di bawah ini :

Gambar 5. Persentase (%) Realisasi Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022



J. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Dalam mengukur tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

KATEGORISASI PENCAPAIAN KINERJA PER INDIKATOR SASARAN

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberi informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari :

Adapun target dan capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 11. Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BPKAD	Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD	-	-	-	Penilaian RB dilakukan tahun 2023
		Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD	B	B	B	Berhasil
		Persentase laporan keuangan yang memenuhi standar dan terverifikasi	100	81,76	81,76	Cukup Berhasil
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	100	90,85	90,85	Berhasil
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Penyampaikan Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	84,85	84,85	Cukup Berhasil
4.	Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran	100	88,93	88,93	Cukup Berhasil

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tahun 2022 diatas, dapat dijelaskan masing - masing capaian indikator sasaran beserta penjelasan analisisnya sebagaimana berikut:

Tabel 12. Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Sasaran I : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BPKAD)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI (%)	CAPAIAN	TARGET RENSTRA	REALISASI (%)	CAPAIAN
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2022 (%)	2022 (%)
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BPKAD	Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD	-	-	Penilaian RB dilakukan tahun 2022	-	-	Penilaian RB dilakukan tahun 2023
	Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD	BB	BB		B	B	B
	Persentase laporan keuangan yang memenuhi standar dan terverifikasi	100	100		100	81,76	81,76

Tabel 13. Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Sasaran II : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI (%)	CAPAIAN	TARGET RENSTRA	REALISASI (%)	CAPAIAN
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2022 (%)	2022 (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	100	100	100	100	90,85	90,85

Tabel 14. Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI (%)	CAPAIAN	TARGET RENSTRA	REALISASI (%)	CAPAIAN
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2022 (%)	2022 (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	100	100	100	84,85	84,85

Tabel 15. Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 (Sasaran IV : Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI (%)	CAPAIAN	TARGET RENSTRA	REALISASI (%)	CAPAIAN
		2021 (%)	2021 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2022 (%)	2022 (%)
Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran	100	100	100	100	88,93	88,93

K. PENYEBAB KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 ada yang berhasil, dan ada pula yang cukup berhasil. Keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan oleh :

1. Dukungan aktif serta komitmen dari seluruh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dengan sebaik-baiknya.

2. Dukungan dan komitmen OPD lain yang memiliki keterkaitan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peran serta masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

L. TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Target capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan seperti table di bawah ini :

Tabel 16. Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BPKAD	Indeks Reformasi Birokrasi BPKAD	BB
		Nilai Evaluasi SAKIP BPKAD	A
		Persentase laporan keuangan yang memenuhi standar dan terverifikasi	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP dan Tepat Waktu	100
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan aset daerah	Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan BMD yang sesuai ketentuan dan tepat waktu	100
4.	Peningkatan Efektifitas Penganggaran Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Anggaran	100

Adapun target capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dilihat dari segi penganggaran belanja ditunjukkan dalam table di bawah ini :

Tabel 17. Target Capaian Kinerja Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)
1	2	4
1	KEUANGAN	264.717.730.471,00
	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.066.085.834,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297.880.558,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.025.619,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	120.971.684,00
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.883.255,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.429.878.288,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.207.177.183,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.638.172,00

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)
1	2	4
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	167.062.933,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.090.837,00
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125.090.837,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.851.158.754,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	117.095.084,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	743.135.159,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.370.344,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	623.764.156,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	307.964.621,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	96.629.390,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	917.200.000,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.323.682.904,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.911.502.776,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	412.180.128,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.528.023.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.005.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.012.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.821.600,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	752.184.400,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.510.371.493,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	843.848.936,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	666.522.557,00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	242.485.682.956,00
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.866.767.351,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	135.895.012,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	89.765.038,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	21.126.923,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	423.670.300,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	303.217.272,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	893.092.806,00
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.394.798.507,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	590.121.771,00
	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	175.872.263,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	265.661.422,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	55.598.949,00
	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	307.544.102,00
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.367.765.290,00
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Behan	140.711.798,00
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	446.416.505,00

No	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)
1	2	4
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	315.436.828,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	30.201.664,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	298.874.705,00
	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	136.123.790,00
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	237.488.946.924,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	8.936.500.000,00
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	214.053.754.200,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000,00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.498.692.724,00
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	367.404.884,00
	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	222.467.454,00
	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	144.937.430,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.165.961.681,00
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.165.961.681,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	174.276.100,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	337.607.906,00
	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	196.827.400,00
	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	354.585.160,00
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	102.665.115,00
II	PEMBIAYAAN DAERAH	14.879.000.000,00
	- Pengeluaran Pembiayaan	14.879.000.000,00
	SUBTOTAL BELANJA DAERAH	264.717.730.471,00
	- SUBTOTAL BELANJA OPERASI	30.382.771.733,00
	- SUBTOTAL BELANJA MODAL	7.738.511.814,00
	- SUBTOTAL BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
	- SUBTOTAL BELANJA TRANSFER	216.596.446.924,00
	TOTAL BELANJA DAN PEMBIAYAAN	279.596.730.471,00

Kasongan, Januari 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan,



TOTO JAYA, S.Pi

Pembina

NIP. 19720229 200604 1 008